

**ANAK JALANAN DI SIMPANG LAMPU MERAH
TELANAIPURA KOTA JAMBI
(Analisis Terhadap Dampak Eksploitasi Anak)**

Zarfina Yenti, Samsul Huda, Agus Piadi⁹

Abstract: *The children on public road represent one of the social problem faced by Indonesian nation. In every country in this world also find the same social problem as the problem of prostitution which is difficult to find the exact formula to handle it, as complicated as the problem of children on public road. The amount of waif is clearly increasing although it almost impossible to get the opening statistic. Government is assessed cannot do many things to save them. Everyday, the children on the public road are fear of various threat includes the bad behaviour of government officers. In Jambi, the problem of children on public road is complicated enough to solve because its handling is not just to give sympathy paid, so that the government should have the exact policy to handle it. Their social balance are need to think of because what they will be if they have imbalance social problem? this will result bad effect for their behaviour and environment in the future.*

Kata Kunci: *Anak Jalanan, eksploitasi*

Anak jalanan merupakan salah satu dari masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Di bangsa manapun di dunia masalah sosial juga bermunculan, seperti halnya masalah pelacuran yang begitu sulit mencari formula yang jitu untuk menanganinya. Kompleksitas masalah anak jalanan juga tidak kalah ruwetnya.

Jumlah anak terlantar dan anak jalanan jelas terus meningkat, meskipun hampir mustahil memperoleh statistik resminya, pemerintah dinilai tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan mereka. Setiap hari anak-anak jalanan dihantui berbagai ancaman termasuk perilaku jahat aparat.

⁹ Fakultas Adab IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Arif Rahman Hakim. Email: Sams@yahoo.co.id

Di Jambi masalah anak jalanan cukup merepotkan pemerintah kota, karena penanganannya tidak cukup hanya dengan diberikan santunan karena setelah santunan itu habis mereka akan kembali ke jalanan lagi. Untuk itu perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk menanganinya tidak cukup hanya rumah singgah atau penyuluhan sosial, perlu ada pengkajian terlebih dahulu akar masalahnya. Keseimbangan sosial mereka perlu secepatnya dipikirkan. Karena apa jadinya anak-anak yang dianggap sebagai generasi penerus jika masalah sosial tidak stabil dan seimbang? Hal ini akan berdampak buruk pada perilaku dan masa depan anak sendiri dan lingkungannya.

LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah-masalah sosial pada hakekatnya juga merupakan fungsi-fungsi struktural dari totalitas sistem sosial, yaitu berupa produk atau konsekuensi yang tak diharapkan dari satu sistem sosio cultural (Kartono, 2005 : 4)

Anak jalanan merupakan salah satu dari masalah sosial yang ada di muka bumi ini. Formulasi alternatif untuk melengkapi arti “masalah sosial” ialah “disorganisasi sosial”. Faktor-faktor yang menyebabkan disorganisasi sosial adalah faktor politik, religius dan sosial budaya memainkan peranan penting di samping faktor-faktor ekonomi (Ibid : 7) ¹⁰

Fenomena anak jalanan bukanlah hal baru pada masyarakat perkotaan. Akan tetapi fenomena ini semakin hari semakin marak terlihat. Terutama dipersimpangan lampu merah yang ada di kota Jambi. Fenomena ini terlihat semenjak munculnya era reformasi tahun 1999. Munculnya era ini membuat semua lini kehidupan berubah. perubahan sosial kemasyarakatanpun terjadi di masyarakat. Pemerintah kota sendiri mengakui bahwa anak jalanan masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemkot (Jambi Ekspres, Rabu

10 Mengenai hal ini kaum interaksionis dengan teori interaksionalnya menyatakan bahwa bermacam-macam faktor tadi bekerja sama, saling mempengaruhi, dan saling berkaitan satu sama lain sehingga terjadi, interplay yang dinamis dan bisa mempengaruhi tingkah laku manusia

12 Maret 2008). Untuk itu perlu adanya penanganan yang tepat dan terarah serta sedini mungkin.

Sebenarnya anak jalanan merupakan bagian anak bangsa Indonesia, yang membedakan mereka dengan anak-anak lainnya hanyalah dalam hal keberadaan sosial dan ekonominya. Beda sosial ini kemudian menciptakan perbebedaan-perbedaan lainnya, dan akhirnya membentuk jurang pemisah yang dalam.

Di sisi lain, mereka adalah anak-anak yang perlu mendapat porsi perhatian dan porsi penanganan bagi anak seusianya. Dan yang jelas merekapun insan Tuhan yang tidak boleh dilihat sebelah mata karena keterbatasan nasibnya.

Selain itu anak jalanan sangat rentan dengan kekerasan, pelecehan seksual (pemerkosaan dan sodomi), karena mereka memang tinggal di lingkungan yang keras. Ragam kehidupan yang mereka saksikan tak lain adalah menghadapi kekerasan dan ketidakadilan, sehingga sulit untuk mengerti bahwa Tuhanpun menyayangi mereka, karena kehidupan mereka selalu berada pada posisi yang sulit (Ilyas, 2006 : 121). Selain itu masalah lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat membangun atau sebaliknya merusak kepribadian manusia terlebih terhadap anak-anak. Sebabnya pada saatnya mereka belum memiliki bentuk dan pola pemikiran tertentu, serta tidak memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Anak-anak cenderung memperhatikan dan mempraktekan apa-apa yang dilihat dan didengarnya, karena itu besar kemungkinan anak-anak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi kehidupannya (Qaini, 2003 : 141).

Peran lingkungan dalam mengembangkan bakat, potensi dan kepribadian seseorang, serta mengarahkan prilakunya amat besar. Bahkan memiliki pengaruh timbal balik antara individu dan lingkungan amat besar, bahkan melebihi pengaruh yang diturunkan secara genetis. Pengaruh timbal balik antara individu dan lingkungan baik individu terpengaruh oleh masyarakat sehingga menyebabkan kepribadian serta perilakunya berubah total maupun individu yang mempengaruhi masyarakat akan mendorong terjadinya tatanan kehidupan dalam skala sosial.

Dalam sejumlah hasil penelitian, para pengamat sosial menyimpulkan, bahwa kehidupan di kawasan padat dan kumuh, amat rentan terhadap kemunculan berbagai penyimpangan perilaku anak. Anak-anak tidak akan lolos dan terbebas dari pengaruh yang dijelaskan masyarakat atau lingkungan yang dipenuhi dengan tindakan kriminal, kerusakan moral dan penyimpangan sosial (*Ibid* : 245). Kita semua pernah mendengar masalah anak-anak di bawah umur yang mendapat perlakuan sodmi, mereka mau menerima perlakuan seperti itu hanya untuk menerima sebungkus nasi (Swadesi, No. 1484 Th XXVIII, 28 Januari- 3 Februari 1997). Atau masalah pelacuran di usia dini, belum lagi ditemui pula kebiasaan mencuri yang kini semakin mewabah. Tuntutan perut ini akhirnya mendorong mereka untuk menarik kesimpulan bahwa, daripada mati kelaparan lebih baik mati dalam keadaan kenyang.

Untuk kasus kota jambi, terutama di simpang lampu merah Telanaipura Jambi, ada beberapa bentuk atau ragam anak jalanan dalam mencari nafkah. Ada yang berjualan koran atau sekedar menyanyi di simpang lampu lampu, kemudian menadahkan tangan (Observasi tanggal 20 April 2008). Seorang anak yang berjualan koran ketika ditanya alasannya berjualan koran “karena adiknya banyak dan dia harus berhenti sekolah guna untuk membantu ibunya menyekolahkan adik-adiknya (Lutfi, Wawancara: 24 April 2008). Sedangkan yang sekedar mengamen mengakui bahwa mereka disuruh orang tuanya untuk mengamen guna untuk mencukupi uang sekolah dan jajannya (Nike, Wawancara: 25 April 2008). Ketika orang tuanya didatangi mereka menjawab “Kalo saya yang ngamen, nggak sesenpun akan dapat uang, sedangkan kita harus makan, dan adiknya banyak, biar dia saja yang ngemis” (Ibu Ati, wawancara: 25 April 2008). Itulah bahasa cinta mereka. Cinta yang mengambil bentuk dalam “bahasa eksploitasi” menurut pengertian kita. Bagi mereka itulah cinta, cinta orang tua kepada anaknya. Mereka tidak ingin anak mereka mati kelaparan. Sedangkan yang lainnya mengaku bahwa mereka disuruh untuk mengemis karena harus menyeter kepada pelindungnya.

Untuk itulah intervensi terhadap kehidupan mereka harus dilakukan, karena anak jalanan adalah juga anak-anak bangsa pemilik masa depan negeri ini, tetapi jiwa dan raga kecil mereka tidak ikut menikmati masa kanak-kanak menyenangkan yang dimiliki anak lain yang berasal dari lingkungan yang berkecukupan. Anak-anak jalanan harus bekerja dan berjuang mencari makan sementara anak-anak normal bisa bermain sepuasnya.

Intervensi itu menurut Roostien Ilyas, seorang pemerhati anak jalanan harus berupa pertama kemauan politik pemerintah, kedua meskipun negara melalui pemerintah sudah sepatutnya menangani anak-anak jalanan secara lebih serius, masyarakat juga harus semakin menaruh perhatian kepada mereka. Perhatian bisa berupa kontrol terhadap mereka. Perhatian bisa berupa kontrol terhadap kinerja lembaga – lembaga pemerintah yang mengurus anak-anak jalanan. ketiga, keterlibatan masyarakat secara langsung. Baik dengan cara membantu kehidupan anak-anak jalanan itu maupun sekedar memberi perhatian yang lebih. Pekerja sosial yang menangani anak-anak jalanan harus diperbanyak dan jangkauan diperluas (Opcit : 110)

Di kota Jambi sendiri, upaya Pemkot untuk mengatasi anak jalanan belumlah maksimal. Itupun hanya berupa bantuan dalam bentuk santunan dan bersifat sementara (Jambi Ekspres, Selasa, 26 Februari 2008). Mereka mendapat bantuan itupun harus berdemonstrasi terlebih dahulu. Karena menganggap pemerintah kota tidak komit pada janjinya.

Untuk itulah penelitian tentang anak jalanan dianggap sangat signifikan untuk dilakukan mengingat mereka adalah anak-anak masa depan bangsa. Tangan-tangan kecil anak-anak jalanan itu menanti uluran tangan kita semua, terutama anak-anak jalanan yang ada di kota Jambi.

RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan:

1. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi anak pada anak jalanan?

2. Bagaimana bentuk eksploitasi anak pada anak jalanan di simpang lampu merah Telanaipura Jambi?
3. Faktor apakah yang menyebabkan munculnya anak jalanan?
4. Bagaimanakah penanganan yang tepat untuk mengatasi meningkatnya anak jalanan di Kota Jambi?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan

1. Untuk mengetahui dampak eksploitasi anak pada anak jalanan di Simpang lampu merah Telanaipura kota Jambi.
2. Untuk mengungkapkan bentuk-bentuk dari eksploitasi anak pada anak jalanan.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab munculnya anak jalanan.
4. Untuk memecahkan solusi yang tepat dalam menangani maraknya anak jalanan di Simpang Lampu Merah Kota Jambi.

Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah umumnya, dan pemerintah Kota Jambi khususnya, terutama dalam mengatasi permasalahan sosial anak jalanan. Di samping itu penelitian ini sebagai kontribusi ilmiah dan dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi anak jalanan yang biasa mangkal yaitu Simpang lampu merah Telanaipura Jambi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Masalah utama yang akan menjadi sasaran penelitian ini adalah dampak eksploitasi anak pada anak jalanan, studi kasusnya anak jalanan di Simpang lampu merah Telanaipura Jambi.

JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data skunder.

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik, dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya (Subagyo, 2004 : 87). Data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan anak-anak jalanan yang ada di Simpang Lampu merah kota Jambi, komunitas dan orang tua mereka. Dan pemerintah kota Jambi dan LKPJ (Lembaga Komunitas Peduli Anak Jalanan) serta yayasan yang bergerak di bidang sosial seperti YABIMA.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen atau dari bahan perpustakaan (Ibid : 88)

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci (responden) dan informan pendukung. Sumber data informan kunci diperoleh melalui:

1. Anak-anak jalanan yang berada di simpang lampu merah Telanaipura Jambi, komunitasnya dan orang tua mereka.
2. Pemerintah Kota Jambi, baik di bagian sekretaris daerah, Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial.

Sedangkan sumber data informan pendukung diperoleh melalui tokoh masyarakat, ketua RT, atau masyarakat yang melintas di simpang lampu merah Telanaipura.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data (Singariabun, 1987 : 106). Populasinya adalah seluruh anak jalanan yang ada di simpang lampu merah Telanaipura kota Jambi.

Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive Sampling*.

Dengan anggapan bahwa sampel yang diambil itu mencerminkan (representasi) bagi penelitian. Diantaranya adalah 10 anak jalanan dan orang tuanya, sekda kota Jambi, Kepala dinas Sosial, penyuluh sosial, masyarakat yang melintas di simpang Lampu merah Telanaipura Jambi. Ketua RT tempat tinggal anak.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lapangan penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan sistem fenomena yang diselidiki untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang diteliti.

Observasi yang penulis lakukan di sini adalah observasi partisipan langsung yaitu dimana yang menjalankan penelitian terjun langsung dan berkecimpung bersama objek penelitian.

Wawancara

Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya pada responden. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi anak jalanan dan dampak yang ditimbulkannya baik untuk diri anak sendiri maupun untuk masyarakat sekitar.

Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah data yang telah tersusun yang terdiri dari surat-surat, majalah, buku-buku notulen, rapat perkumpulan, dokumentasi resmi dari berbagai instansi pemerintah.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisa penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif yang akan di analisa dengan non statistik yang berupa uraian kalimat yang dapat di pakai dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak Di Simpang Lampu Merah

Ada bermacam-macam bentuk eksploitasi (UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak: 58.) anak yang terdapat pada anak jalanan karena anak-anak tersebut hidup di jalanan maka mereka sangat rentan terhadap segala bentuk eksploitasi. Belum lagi mereka seringkali melihat kekerrasab yang terjadi di jalanan. Mereka juga sangat rentan dengan kecelakaan, karena mereka kadang-kadang tidak menghiraukan kendaraan yang lalu lalang. Bila diamati pada simpang lampu merah Telanai maka terdapat beberapa bentuk atau kategori anak jalanan diantaranya adalah:

- a. Penjual Koran
- b. Pengamen
- c. Mengemis
- d. Penjual koran merangkap pengamen

Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan

Pada umumnya masalah-masalah sosial terjadi disebabkan oleh faktor-faktor politik, religius, dan sosial budaya memainkan peranan penting di samping faktor ekonomi. Mengenai hal ini, kaum interaksionis dengan teori interaksionalnya menyatakan bahwa bermacam-macam faktor tadi bekerja sama, saling mempengaruhi dan saling berkaitan satu sama lain sehingga terjadi interplay yang dinamis dan bisa mempengaruhi tingkah laku manusia. Terjadilah kemudian perubahan tingkah laku dan perubahan sosial sekaligus timbul perkembangan yang tidak imbang dalam kebudayaan, disharmoni, atau ketidakselarasan, ketidakmampuan penyusuaian diri, konflik-konflik dan tidak adanya konsensus. Hal ini menyebabkan penyimpangan tingkah laku yang menjadi masalah sosial (Kartono, 2005 : 7)

Secara konseptual ada beberapa teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kemiskinan diantaranya perspektif budaya kemiskinan, yakni perspektif fungsionalis, perspektif konflik, dan perspektif interaksionis (Suharto, 2006)

Pada beberapa kasus, kemiskinan diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam lingkaran kemiskinan. Beberapa tokoh

menjelaskan hal tersebut dapat terjadi karena adanya “budaya kemiskinan: Oscar Lewis adalah seorang antropolog yang melakukan studi dan mengembangkan teori teori kemiskinan budaya ini. Lewis meneliti kondisi lingkungan miskin di berbagai belahan dunia dan berhasil menyimpulkan bahwa kelompok miskin menjadi miskin karena gaya hidup mereka yang dipengaruhi oleh budaya tertentu. Budaya kemiskinan berkembang di masyarakat kapitalistik setelah periode keterpurukan ekonomi yang cukup lama. Keterpurukan ini antara lain disebabkan oleh tingginya pengangguran akibat kurangnya keahlian serta rendahnya upah yang diterima pekerja kala itu. ondisi ini menciptakan perkembangan tingkah laku dan nilai yang penuh keputusasaan. Menurut Lewis individu yang dibesarkan dalam budaya kemiskinan memiliki keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan. Mereka menjadi tergantung, merasa rendah diri serta enggan memperbaiki kondisi mereka. Mereka cenderung berorientasi pada masa kini tanpa memperhatikan rencana masa depan, serta bertoleransi tinggi pada segala jenis penyakit fisik.

Teori fungsionalis memandang kemiskinan sebagai akibat dari ketidakberfungsian ekonomi. Perkembangan industrialisasi telah menghancurkan sistem ekonomi. Menurut para penganut fungsionalis cara baik untuk menyelesaikan masalah kemiskinan adalah melakukan penyesuaian untuk memperbaiki ketidakberfungsian tersebut. Selama ini kelompok miskin hanya menikmati sedikit hasil dari pertumbuhan ekonomi serta tidak memperoleh penghargaan sosial dari masyarakat karena status mereka yang berada di lapisan paling bawah dalam stratifikasi sosial.

Sedangkan teori konflik memandang bahwa masyarakat modern memiliki begitu banyak kemakmuran. Karenanya, kemiskinan ada karena struktur kekuatan menginginkannya ada. Mereka memandang bahwa kelompok pekerja miskin telah dieksploitasi serta dibayar dengan upah yang rendah agar kelompok kaya dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan hidup lebih makmur. Menurut perspektif ini, kemiskinan menjadi masalah sosial ketika beberapa kelompok memandang distribusi sumberdaya yang ada

saat ini dirasa tidak adil, dan mereka harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi tersebut. Para tokoh dari perspektif ini percaya bahwa kemiskinan dapat dihilangkan dengan cara melibatkan kelompok miskin dalam kegiatan politik dan pemerintahan serta mengatur kelompok miskin untuk mengurangi ketidakadilan.

Penganut teori interaksionis memandang kemiskinan sebagai masalah pembagian harapan. Kelompok miskin memperoleh penilaian negatif dari kelompok berpengaruh. Mereka yang menjadi objek labeling tersebut akan mencap dirinya negatif dan mulai berlaku sama dengan harapan orang lain terhadap mereka. Kelompok ini percaya bahwa kemiskinan bukan sekedar masalah pengambilan hak ekonomi melainkan masalah konsep diri seorang individu.

Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, kelompok interaksionis mendesak agar stigma dan pandangan negatif yang dihubungkan dengan kemiskinan segera dihilangkan. Perubahan positif dalam kemiskinan tidak akan terjadi hingga kelompok miskin diyakinkan bahwa mereka tidak akan selamanya hidup dalam kemiskinan. Masalah kemiskinan dapat diatasi melalui program bantuan sosial yang dikombinasikan dengan program pemberian kesempatan bagi kelompok miskin untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka, serta program yang mendorong kelompok miskin untuk meredefinisi lingkungan sosial mereka secara lebih positif.

Adapun anak jalanan sendiri adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan bertalian dengan masalah sosial lain, terutama kemiskinan. Kemiskinan diyakini sebagai faktor utama menimbulkan fenomena anak jalanan. Keluarga miskin cenderung menyuruh anak bekerja. Selain itu tidak sedikit anak-anak yang menjadi anak jalanan karena keluarga tidak harmonis, ditelantarkan oleh keluarganya, atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Di kota Jambi terdapat beberapa faktor penyebab di antaranya adalah:

- a. Ekonomi
- b. Orang Tua
- c. Budaya

Dampak Eksploitasi Anak

Secara Fisik

Secara fisik anak jalanan sangat rentan terhadap kecelakaan lalu lintas. Karena mereka bersentuhan langsung dengan pengemudi kendaraan bermotor baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Selain itu hidup di jalanan sangat membahayakan anak. Mereka kerap mengalami eksploitasi ekonomi oleh orang dewasa (termasuk orang tua sendiri). Mereka rentan terhadap kekerasan fisik, sosial bahkan mereka juga rentan terhadap pengguna dan pengedar narkoba atau terlibat kejahatan.

Anak jalanan yang rentan terhadap perilaku pelecehan seksual. Karena jam kerja mereka hingga malam hari, otomatis akan memudahkan anak-anak tersebut mengalami pelecehan seksual baik itu pemerkosaan maupun sodomi.

Secara psikologis

Menurut psikolog Kota Jambi Rezki Takrianty, M.Psi Anak-anak yang hidup di jalanan kehilangan masa anak-anaknya. Hak-hak mereka untuk bermain dan menikmati indah masa anak-anak dirampas oleh keadaan. Untuk itu perlu adanya penanganan secara psikologis agar apa yang mereka alami tidak menular pada generasi selanjutnya (Rezki Takrianti, wawancara: 15 September 2008)

Penanganan Anak Jalanan

Permasalahan anak jalanan di kota Jambi perlu di tangani sedini mungkin karena merupakan masalah sosial yang sangat serius di hadapi kota Jambi. Kartini Kartono memberikan definisi tentang masalah sosial (Kartono, 2005 : 2) ialah:

1. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama.
2. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai pengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Adat istiadat dan kebudayaan itu mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku yang dianggap sebagai tidak

cocok, melanggar norma dan adat istiadat, atau tidak berintegrasi dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah sosial. Masalah sosial pada hakikatnya juga merupakan fungsi-fungsi struktural dari totalitas sistem sosial.

Formulasi alternatif untuk melengkapi arti “masalah sosial” ialah istilah “disorganisasi sosial”. Disorganisasi sosial kadangkala disebut sebagai disintegrasi sosial selalu diawali dengan analisis-analisis mengenai perubahan-perubahan dan proses-proses organik. Teori kultural lag (kelambanan budaya atau kelambanan kultural) menyatakan sebagai berikut: “Apabila bermacam-macam bagian dari kebudayaan berkembang secara tidak seimbang, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka kebudayaan tadi akan mengalami proses kelambanan kultural, kondisi semacam ini bisa dipersamakan dengan disorganisasi sosial atau disintegrasi sosial.

Dalam pengertian tersebut di atas, mesyarakat yang terorganisasi dengan baik dicirikan dengan kualitas sebagai berikut: adanya stabilitas interaksi personal yang intim, relasi sosial yang berkesinambungan dan ada konsensus bertaraf tinggi diantara anggota-anggota masyarakat.

Sebaliknya masyarakat yang mengalami disorganisasi ditandai dengan ciri-ciri perubahan-perubahan yang serba cepat, tidak stabil, tidak ada kesinambungan pengalaman satu kelompok dengan kelompok lainnya. Tidak ada intimitas organik dalam relasi sosial, dan kurang atau tidak adanya persesuaian di antara para anggota masyarakat (Ibid : 5)

Lenyapnya intimitas organik dari relasi sosial dianggap sebagai pertanda masyarakat yang tengah mengalami proses disorganisasi/disintegrasi, yang kemudian digantikan dengan pola individualistis ekstrem dan nafsu mementingkan diri sendiri. Ditandai pula oleh kontak-kontak sosial yang atomistik, relasi yang retak-retak, dan terpecah-pecah sehingga para anggotanya mengalami banyak frustrasi dan terhalangi dalam pemenuhan kebutuhan manusiawi serta keinginan-keinginan pribadinya. Disorganisasi sosial ini merupakan produk sampingan dari perkembangan teknologi, ilmu

pengetahuan, industri, dan urbanisasi yang menimbulkan banyak pergeseran dan perubahan dalam masyarakat sehingga bagian-bagian masyarakat itu tidak bisa diintegrasikan dan terorganisasi secara sempurna.

Pionir-pionir di bidang sosiologi W.I. Thomas dan Charles H. Cooley, banyak menyoroiti masyarakat primer yang kecil strukturnya dengan interelasi yang intim dan menemukan banyak abnormalitas dalam masyarakat sekunder yang terorganisasi serta formal seperti yang terdapat di kota-kota besar. Cooley menganggap kehidupan sosial ini sebagai proses organik, di mana terdapat interaksi yang timbal balik dari masyarakat dengan individu. Menurut dia, disorganisasi sosial itu dimunculkan oleh adanya sifat dinamis dari relasi-relasi individual dengan institusi-institusi/perlembagaan masyarakat. Institusi-institusi itu merupakan alat atau sarana guna memenuhi kebutuhan manusiawi para anggota masyarakat sekaligus berfungsi sebagai alat pengontrol-pembatas terhadap tingkah laku individu dalam masyarakat. Apabila instansi-instansi tersebut tidak sesuai lagi dan tidak tanggap terhadap kebutuhan anggota masyarakat, maka kewibawaan lembaga tersebut jadi hilang dan ia tidak lagi mampu menyelenggarakan fungsi kontrol. Kondisi atau proses semacam ini disebut formalisme. Selanjutnya, Cooley menyebut proses formalisme ini sebagai disorganisasi sosial yang memproduksi banyak tingkah laku sosio patologis.

Uraian terpenting dari Cooley adalah tentang konsepsi mikroskopik-mikroskopik mengenai relasi antara individu dengan masyarakat. Individu dan masyarakat merupakan aspek-aspek yang berbeda dari satu peristiwa yang sama, yaitu kehidupan sosial. Jika orang melihat kehidupan sosial sebagai unit-unit yang diskrit (mempunyai ciri-ciri tersendiri yang khas, yang berlainan), dia akan melihat kehidupan sosial sebagai individu. Sebaliknya apabila dia melihat kehidupan sosial itu sebagai satu kolektivitas, maka dia melihatnya sebagai masyarakat. Jadi, individu dan masyarakat merupakan aspek-aspek yang komplementer dari relasi sosial yang besar yaitu kehidupan sosial. Karena itu disorganisasi sosial bisa timbul pada masyarakat maupun diri individu (Kartono. *Op-cit* : 6)

Disorganisasi sosial bisa berupa “sebab” dan bisa merupakan “akibat”. Disorganisasi sosial mengakibatkan runtuhnya fungsi pengontrol dari lembaga/institusi sosial dan memberikan kemungkinan kepada individu-individu untuk bertingkah laku semau sendiri tanpa kendali. Lenyapnya fungsi pengontrol dan institusi masyarakat dan kemunculan formalisme, sehingga lembaga tersebut berfungsi secara eksternal di luar individu, menyebabkan ditinggalkannya individu-individu secara internal tanpa bimbingan dan tanpa pola umum. Hal ini jelas mengembangkan disorganisasi sosial, dalam mana norma-norma institusional kehilangan sama sekali efektifitasnya.

Fokus utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah pada perlindungan sosial. Oleh karena itu, model pertolongan terhadap anak jalanan bukan sekedar menghapus anak-anak jalan tersebut. Melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang-kurangnya melindungi mereka dari situasi yang eksploitatif dan membahayakan.

Mengacu pada prinsip-prinsip profesi pekerjaan sosial, maka kebijakan dan program perlindungan sosial mencakup bantuan sosial, asuransi, kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan berdasarkan *right based initiatives*, memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak dasar anak sesuai dengan aspirasi terbaik mereka. Strategi intervensi pekerjaan sosial tidak bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan (Suharto, Opcit :233)

1. Street-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di “jalan” dimana anak-anak jalanan biasa beroperasi. Tujuannya agar dapat menjangkau dan melayani anak di lingkungan terdekatnya yaitu di jalan.
2. Famili-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang dipokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga sehingga dapat mencegah anak-anak agar tidak menjadi anak jalanan atau menarik anak kembali ke keluarganya.
3. Institutional-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang di pusatkan di lembaga (panti), baik secara sementara

maupun permanen jika anak jalanan tidak mempunyai orang tua atau kerabat. Pendekatan ini juga mencakup tempat berlindung sementara (drop in), “Rumah singgah” atau “open house” yang menyediakan panti atau asrama adaptasi bagi anak jalanan.

4. Community-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di sebuah komunitas. Melibatkan program-program community development untuk memberdayakan masyarakat atau penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin networking melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup Corporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan).

Penanganan Anak Jalanan di Kota Jambi

Untuk menangani permasalahan sosial di kota Jambi, khususnya anak jalanan biasanya PMKS bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial seperti YABIMA dan LK PAJ. Yayasan inilah yang membuat proposal untuk dana anak jalanan ini. Sebagaimana ketika penulis observasi ke PMKS ada terdapat beberapa proposal yang semuanya memohon bantuan dana untuk mengatasi anak jalanan ini, namun anehnya menurut Syiarudin Kasubsi di PMKS “semakin banyak LSM yang bergerak di bidang sosial (anak jalanan) semakin banyak anak jalanan di kota jambi ini (Syiarudin, PMKS wawancara: 1 16 Juli 2008). Pembinaan yang dilakukan oleh LSM YABIMA di kota Jambi mencakup:

Beasiswa Pendidikan

Beasiswa ini diajukan kepada PMKS, YABIMA mengajukan 150 orang untuk tingkat SD, 50 orang untuk tingkat SMP, serta 20 Orang untuk tingkat SMA, setelah data diolah oleh PMKS, kemudian diajukan kepada Diknas kota.

Selain itu juga memberikan pendidikan yang menyentuh aspek agama, mental dan pengetahuan lain. Adapun guru-gurunya atau pendidik berasal dari kalangan akademisi dan sukarelawan. Yabima juga membuka TK yang dananya berasal dari orang tua

anak. Masing-masing orang tua dipungut Rp.200.000 untuk masuk dan 15000 perbulan. Selain itu Yabima juga mempunyai usaha pendidikan sendiri seperti TK dan SMP Pelita Ibu bekerja sama dengan Muhammadiyah (Belakang Polda)

Pelatihan

Anak-anak jalanan yang tidak melanjutkan pendidikan, maka YABIMA mengadakan pelatihan keterampilan seperti sablon, bengkel membuat sovenir manik-manik yang dikenal dengan nama UEF (Usaha Ekonomi Produktif) dan KUBE (Keluarga Usaha Bersama).

Adapun pemerintah kota sendiri belumlah maksimal dalam menangani anak jalanan ini. Usaha yang mereka lakukanpun hanya bersifat insedentil, berupa sentuhan atau bantuan (Jambi Ekspres, Selasa, 26 Februari 2008). Padahal untuk mengatasi permasalahan sosial diperlukan kebijakan sosial.

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (Suharto, 2007 : 10)

Menurut Bessat, Dalton dan Smith *in Short, social policy repers to what governments do when they attemp to improve the quality of people's live by providing a range of income support community services and support programs* (Bessat Judith Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith, 2006).

Artinya secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program tunjangan sosial lainnya.

Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan) Kuratif (penyembuhan) dan pengembangan (developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi

kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya (Suharto, 2006) Kebijakan sosial seringkali melibatkan program-program bantuan yang sulit diraba atau dilihat secara kasat mata. Karenannya masyarakat luas kadang-kadang sulit mengenali kebijakan sosial dan membedakan kebijakan publik. Secara umum kebijakan publik lebih luas dari pada kebijakan sosial. Kebijakan transportasi, jalan raya, air bersih, pertahanan dan keamanan merupakan beberapa contoh kebijakan publik. Sedang mengenai jaminan sosial, seperti bantuan sosial dan asuransi sosial yang umumnya diberikan bagi kelompok miskin atau rentan, adalah contoh kebijakan sosial.

Kebijakan sosial sejatinya merupakan kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*) yakni kebijakan pemerintah yang secara khusus melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok kurang beruntung yakni para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti keluarga miskin, anak terlantar, pekerja anak, korban HIV/AIDS penyalahgunaan narkoba dan kelompok rentan lainnya, baik secara ekonomi maupun psikososial.

Setiap negara memiliki perbedaan dalam mengkategorikan kebijakan publik dan kebijakan sosial. Di China, kebijakan sosial mencakup pemberian makanan dan pakaian kepada masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan di Belanda kegiatan-kegiatan kebudayaan merupakan bagian penting dari kebijakan sosial (Spicker, 1995)

Salah satu bentuk kebijakan sosial adalah program pelayanan sosial. Pelayanan sosial adalah aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika keadaan individu dan kelompok tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial, seperti kemiskinan, keterlantaran, bahkan kriminalitas. (Suharto, *Op cit*:13) Kategorisasi pelayanan sosial biasanya dikelompokkan berdasarkan sasaran pelayanannya (misalnya: pelayanan atau perawatan anak, remaja, lanjut usia. Setting atau tempatnya misalnya: pelayanan sosial di sekolah, kesehatan, dan perumahan.

Alternatif Penanganan Anak jalanan di Kota Jambi

Alternatif pemecahan masalah atau penanganan anak jalanan di kota Jambi, maka penulis mengajukan beberapa alternatif:

- a. Perda
- b. Pelayanan sosia
- c. Pendampingan secara psikologis
- d. Tokoh panutan dan para mentor
- e. Sosialisasi UU Perlindungan anak hingga ke lapisan bawah.
- f. Kerja sama dengan lembaga pendidikan
- g. Pendidikan Agama dan Umum
- h. Membantu Komunitas.
- i. Kontrol Masyarakat

KESIMPULAN

Anak jalanan adalah anak laki-laki dan perempuan yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum seperti simpang lampu merah, terminal, mal dan sebagainya. Di kota jambi sendiri terutama di simpang lampu merah terdapat empat model anak jalanan yaitu: pengamen, pengemis, penjual koran, pengamen merangkap penjual koran.

Sudah selayaknya anak jalanan di kota jambi diperhatikan karena jalanan bukanlah tempat yang layak bagi mereka. Mereka selayaknya bermain dan belajar di sekolah atau di tempat-tempat yang memang pantas untuk itu. Anak jalanan memiliki resiko yang sangat berbahaya bagi anak baik secara fisik maupun psikologis. Jalanan bukanlah tempat yang baik untuk tumbuh kembang anak dan merealisasi potensinya secara penuh

Untuk itulah penanganan terhadap mereka sangat mendesak. Intervensi yang bisa dilakukan haruslah bersifat preventif, akuratif, edukatif dan rehabilitatif. Maka diantara solusi yang ditawarkan adalah membentuk perda, sosialisasi UU perlindungan anak hingga ketingkat bawah, pendidikan umum dan agama, kerjasama dengan lembaga pendidikan, partisipasi masyarakat, pembekalan atau pelatihan yang akan menghasilkan sesuatu yang produktif, serta yang tak kalah penting adalah pendampingan secara psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994
- Ilyas, Roostien *Anak-anakku Yang Terlantar*. Jakarta: Pensil, 2006
- Judith Rob Watts, Bessat. Tony Dalton dan Paul Smith, , *Talking Policy: How Social Policy in Mode*, Crow nest: Allen and unuin, 2006
- Jambi Ekspres, “*Anjal Tagih Janji Walikota*” Selasa, 26 Februari 2008
- Jambi Ekspres, “*Walikota Santuni 31 Anak Jalanan*” ,Rabu 12 Maret 2008
- Jambi Ekspres, *Pengemis di mata Ulama dan Umaro*. Di nilai profesi kurang baik, patut ditanggulangi, Senin 08 September 2008.
- Kartono, Kartini *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Kartono, Kartini *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Qaini, Ali *Single Parent: Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, Bogor: Cahaya, 2003,
- Suharto, Edi *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis*, 2006
- Suharto, Edi *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Spicker, 1995. *Social Policy: Themes and Approaches*. London: Prentice Hall.
- Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Singariabun, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta, Bumi Aksara, 1987
- Swadesi, No. 1484 Th XXVIII, “*Wabah Kejahatan Seks Pada Anak-anak Merejalela*” 28 Januari- 3 Februari 1997
- Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 2005. Depertemen Kom info RI dan Badan Informasi Publik Pusat Informasi kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang

Pelindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Departemen sosial RI.